GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	: Kompas	Tanggal	: 30 Desember 2006
Subyek	: KLH Usulkan Motarium terbatas	Hari	: Sabtu
		Halaman	: 12

lingkungan

KLH Usulkan Moratorium Terbatas

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengusulkan moratorium terbatas penebangan hutan yang disinyalir menyebabkan keberlanjutan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Sebelumnya, organisasi nonpemerintah telah menyerukan hal serupa.

"Saya akan sampaikan usulan ini pada rapat kabinet dalam waktu dekat. Butuh langkah drastis penanganan masalah ini di tengah kerusakan lingkungan seperti sekarang," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di sela Rapat Koordinasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, di Jakarta, Jumat (29/12).

Menurut dia, moratorium atau penghentian sementara yang terbatas berarti memberlakukan izin penebangan yang sangat ketat dengan perizinan berlapis. Namun, tetap memberi kelonggaran penduduk lokal mencari kayu hutan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk memasak.

Beberapa organisasi nonpemerintah bahkan mengusulkan pelarangan penebangan hutan untuk selamanya dan merestorasi kawasan hutan yang rusak.

Pemegang izin hak pengelolaan hutan dan hutan tanaman industri, dalam konsep KLH nantinya termasuk golongan yang diusulkan menghentikan penebangan. Rachmat juga menegaskan akan menemui Menteri Kehutanan mengenai hal itu.

Diakui Rachmat, usulan itu tidak populer bagi pengusaha kayu atau industri dalam skala besar. Namun, langkah ini mendesak dilakukan demi masa depan lingkungan dan masyarakat.

"Bukan maksudnya menghalangi industri, tetapi mari dalam kondisi seperti ini mengutamakan suara nurani. Bukan perdebatan hukumnya," kata dia.

Sebagai prioritas, KLH mengajukan moratorium terbatas di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kalimantan. Laju kerusakan hutan di dua wilayah ini dinilai terparah. Bahkan di NAD, kawasan hutan konservasi pun tak luput dari perambahan sehingga mengakibatkan banjir dan longsor baru-baru ini.

Rachmat mengatakan, pihaknya secara khusus akan mendatangi pemerintah daerah di NAD seusai pengesahan, khusus membahas penghentian penebangan di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Usulan konkret KLH lainnya adalah pendataan ketat gergaji mesin yang digunakan perusahaan kayu. Setiap gergaji mesin wajib bernomor register dan dapat diklarifikasi.

"Bila tak bisa menunjukkan nomor registrasinya, berarti itu ilegal. Dengan ini, kerusakan hutan terkendali," katanya. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup